

PENGARUH KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT PEMBIAYAAN SiLPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nyayu Nazila Nurhasanah¹⁾, Anggeraini Oktarida^{2*)}, Kiagus Zainal Arifin³⁾

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

Email: anggeraini_oktarida@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian dimaksudkan dengan tujuan mengetahui pengaruh ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap belanja modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini difokuskan pada Kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan pada hasil laporan realisasi anggaran Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari situs resmi Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id). Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel uji sebanyak 18 Kabupaten atau Kota pada tahun 2017-2021 (5 tahun) dan total atau jumlah laporan realisasi anggaran 90 Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan software yaitu SPSS versi 26. Hasil yang didapatkan setelah melalui beberapa uji penelitian membuktikan bahwasannya ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh yang positif juga signifikan pada pertumbuhan belanja modal, artinya semakin tinggi nilai ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA, semakin tinggi pula kemungkinan peluang peningkatan pada belanja modal tersebut.

Kata Kunci : Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA, Belanja Modal

Abstract

The research is intended with the aim of knowing the effect of regional financial dependence and the level of SiLPA financing on capital expenditures in regencies or cities in South Sumatra Province. This research is focused on regencies or cities in South Sumatra Province. The data used in this study were obtained from the results of the budget realization report of the Regency or City in South Sumatra Province which came from the official website of the Ministry of Finance (djpk.kemenkeu.go.id). The data in this study used secondary data with a total test sample of 18 districts or cities in 2017-2021 (5 years) and a total or total of 90 district or city budget realization reports in South Sumatra Province. Multiple linear regression analysis is a data analysis technique used in this study with the help of software, namely SPSS version 26. The results obtained after going through several research tests prove that regional financial dependence and the level of SiLPA financing have a positive and significant influence on the growth of capital expenditure, meaning that the higher the value of regional financial dependence and the level of SiLPA financing, the higher the possibility of an increase in capital expenditure.

Keywords: Regional Financial Dependency, SiLPA Financing Level, Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak istimewa dalam mengatur pemerintahan daerahnya sendiri secara bebas berdasarkan standar otonomi juga kewajiban-kewajiban serupa. Pembangunan daerah adalah komponen penting dari upaya pembangunan nasional, yang ditekankan pada pemberdayaan

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, ini adalah perkembangan terkini yang sebelumnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dikatakan bahwa Otonomi

Daerah merupakan wewenang, komitmen dan hak suatu wilayah otonom agar mandiri dalam menyusun juga melaksanakan tata kelola pemerintahan serta kepentingan lokal di bawah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara untuk memahami tujuan kemandirian daerah adalah melalui belanja modal, yang merupakan upaya daerah dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk melayani masyarakat dan menjalankan pemerintahan setempat. Penggunaan modal ini memberikan dampak berkelanjutan serta bertujuan untuk menyediakan bantuan atau layanan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kepentingan wilayah agar prasarana untuk melaksanakan tujuan pemerintah dan sarana umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan dan kesiapan yang baik dalam menyalurkan belanja modal. Hal ini disebabkan karena belanja modal menjadi cara bagi pemda untuk memberikan bantuan atau layanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Belanja operasi lebih berpengaruh di dalam belanja daerah pada Provinsi Sumatera Selatan saat tahun 2017-2021. Peneliti membuat grafik yang menggambarkan atau memperlihatkan,

bahwasannya belanja operasi mengalami fluktuatif yang dimulai pada tahun 2017-2021. Belanja yang tak terduga nilainya bervariasi pada tahun 2017-2021. Sementara itu, belanja modal mendapat kenaikan ataupun penurunan yang progresif pada tahun 2017-2021. Meskipun demikian, cenderung terlihat bahwa pada tahun 2020 belanja modal nilainya tidak naik ataupun turun secara signifikan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan hingga Agustus 2021, Laporan pelaksanaan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diidentifikasi berdasarkan fungsi dan jenisnya. mengalami penurunan pada Januari hingga bulan Agustus 2021 yaitu pada periode serupa namun tahun lalu apabila dibandingkan. Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa observasi terhadap setiap jenis belanja, terutama belanja modal, dari awal tahun sampai bulan Agustus 2021 menunjukkan penurunan sebesar 3,7%, atau setara dengan Rp38,7 triliun (3,2% dari APBD). jika di bandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2020, dicatat sebesar Rp40,22 triliun yaitu (3,8% dari nilai APBD). Menurut Perbendaharaan, bahwasannya penggunaan belanja modal dari semua daerah, tercatat provinsi Sumatera Selatan, termasuk kategori rendah. (<https://nasional.kontan.co.id>).

Tabel 1
Rata-Rata Belanja Modal
Pemerintahan Kabupaten atau Kota
Provinsi SUMSEL Tahun 2017-2021

DAERAH	%
Provinsi Sumatera Selatan	20.55%
Kabupaten Banyuasin	21.71%
Kabupaten Musi Banyuasin	29.85%
Kabupaten Musi Rawas	27.26%
Kabupaten Muara Enim	26.95%
Kabupaten Lahat	23.41%
Kabupaten Ogan Ilir	24.68%
Kabupaten OKI	22.95%
Kabupaten OKU	24.78%
Kabupaten OKUT	24.64%
Kabupaten OKUS	28.92%
Kabupaten Empat Lawang	30.71%
Kabupaten PALI	44.02%
Kabupaten Muratara	37.19%

Kota Palembang	25.30%
Kota LubukLinggau	29.46%
Kota Prabumulih	20.52%
Kota PagarAlam	24.90%

Sumber: data diolah tahun 2022, BPK RI

Sebagaimana dilihat pada tabel 1, terlihat bahwa belanja modal di pemerintah daerah Sumatera Selatan mulai tahun 2017-2021 mendapat nilai normal tiap tahunnya yaitu tidak mencapai 30%, yang artinya nilai tersebut lebih kecil dari belanja pada pegawai ataupun belanja pada barang dan jasa. Selanjutnya, dapat kita lihat hanya pada kabupaten Empat Lawang, PALI juga MURATARA yang berhasil dalam memperoleh pengalokasian yang nilai pencapaiannya hingga melewati angka 30 %. Berdasarkan informasi tersebut dapat disampaikan bahwa kebanyakan daerah kabupaten atau kota wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak mampu merealisasikan dari target untuk jangka waktu 2017-2021 yang dengan asumsi belanja modal secara umum sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) seharusnya pada dasarnya mendasarkan pada 30% dari belanja daerah (sesuai Permendagri No. 27 tahun 2013). Selain itu, Menurut kebijakan Kementerian Dalam Negeri, porsi yang harus didapat pada belanja modal diharuskan berkisaran 30% sampai 40% terhadap jumlah total pengalokasian belanja pada daerah (<https://www.beritasatu.com/>).

Faktor pertama yang diperkirakan mempengaruhi belanja modal adalah Ketergantungan keuangan daerah yang merupakan hubungan antara pendapatan transfer dan total pendapatan daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula ketergantungan keuangan daerah tersebut. Hal ini telah menurunkan kinerja keuangan daerah. Hady, dkk (2018) menunjukkan dampak ketergantungan fiskal daerah terhadap belanja modal. Studi Yulistiani & Suji (2020) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara belanja modal dengan ketergantungan keuangan daerah.

Faktor kedua yang juga diperkirakan mempengaruhi belanja modal adalah tingkat pembiayaan SiLPA. Tingkat pembiayaan SiLPA dapat dilihat dari persentase porsi belanja yang tidak terserap atau tertunda yang menunjukkan proporsi SiLPA tahun

sebelumnya yang digunakan untuk belanja daerah pada tahun berjalan, DJPK (2014). Menurut Yulistiani & Suji (2020) tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut menegaskan bahwa semakin besar SiLPA suatu daerah maka akan diikuti oleh besarnya alokasi belanja modal juga.

Menurut literatur ada beberapa faktor yang mempengaruhi belanja modal, diantaranya faktor ketergantungan keuangan daerah (Hady, dkk, 2018), dan tingkat pembiayaan SiLPA, (Yulistiani & Suji, 2020). Berdasarkan data yang ada peneliti memilih kabupaten ataupun kota di Provinsi Sumatera Selatan karena belanja modal termasuk dalam kategori rendah apabila diukur melalui rata-rata realisasi belanja modal. Sebab dari itu, peneliti ingin membahas penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

Berdasarkan landasan permasalahan diatas, bisa disimpulkan ada permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana ketergantungan keuangan daerah akan mempengaruhi hubungan terhadap belanja modal pada Kab/Kota di Provinsi SUMSEL?, Bagaimana tingkat pembiayaan pada SiLPA akan berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada Kab/Kota di Provinsi SUMSEL? dan Bagaimana ketergantungan pada keuangan daerah dan tingkat pembiayaan pada SiLPA akan berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal pada Kab/Kota di Provinsi SUMSEL?.

2. TELAHAH LITERATUR

Teori Keagenan (Agency Theory)

Berdasarkan pada penelitian (Jensen dan Meckling dalam Aulia, 2020) dijelaskan bahwasannya ada persetujuan yang dibuat yang juga disetujui oleh pihak yang bersangkutan khususnya pihak agen serta pihak prinsipal.

Adanya kontribusi antara kedua pihak tersebut dalam hal pelaksanaan pada kekuasaan yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada tertuju yaitu pihak agen melalui soal kesepahaman yang akan disepakati oleh kedua pihak. Untuk dapat mengakomodasi koneksi dalam keagenan, biasanya harus ada kesepakatan, dikarenakan koneksi keagenan dapat menimbulkan masalah antar prinsipal juga agen. Keterkaitan antara hipotesis keagenan tersebut dan penelitian ini harus terlihat pada ikatan antara Pempus dan Pemda yang akan bergerak sebagai agen. Pemerintah pusat akan bergerak ke pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah mengenai hal penyediaan pelayanan umum. Hubungan di dalam keagenan adalah sebagai pihak agen dalam pemerintah daerah, ia bertanggung jawab untuk melaksanakan penggunaan anggaran yang sudah diberikan pihak prinsipal khususnya pemerintah pusat.

Belanja Modal

Pengertian belanja modal pada LRA adalah komponen dalam pengeluaran yang sangat vital dan menjadi perhatian publik. Hal ini terjadi atau muncul karena warga yang menjadi penyandang dana publik melakui iuran atau pembayaran pajak yang mereka bayarkan berkepentingan agar mengetahui apakah aset tersebut telah digunakan secara teratur, layak dan produktif untuk pelayanan warga. “Belanja Modal merupakan belanja dalam rencana keuangan agar memperoleh aktiva tetap dan aktiva lain memberikan keuntungan jangka panjang”. Sesuai dengan penegasan pada PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran khususnya pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah,

Menurut (Kawatu, 2019) proporsi terhadap belanja modal bisa dihitung menggunakan metode berikut:

Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut (DJPK, 2014), Proporsi ketergantungan keuangan akan menunjukkan level ketergantungan pada kabupaten terkait bantuan luar entitas khususnya dimulai oleh pempus ataupun pemda lainnya. Proporsi

tersebut akan ditentukan membagi perolehan pendapatan transfer dari pempus pada seluruh pendapatan daerah. Hasil perhitungan tersebut akan menunjukkan seberapa tinggi level ketergantungan keuangan pemda tersebut dengan pempus. Rasio menurut (Mahmudi, 2019:140) dapat dihitung dengan metode berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2
Kriteria Dalam Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan	Tingkat Ketergantungan
00 – 25	Sangat Rendah
25 - 50	Rendah
50 - 75	Sedang
75 - 200	Tinggi

Sumber: (Zulkarnain, 2020)

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat Apabila nilai rasio semakin, pemerintah daerah akan semakin bergantung kepada pemerintah pusat. Jika hasil perhitungan menunjukkan total pendapatan transfer lebih besar maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah masih kesulitan dalam membiayai daerahnya sendiri dengan menggunakan PAD, sehingga masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan dengan pemerintah pusat, begitu pun sebaliknya.

Tingkat Pembiayaan SiLPA

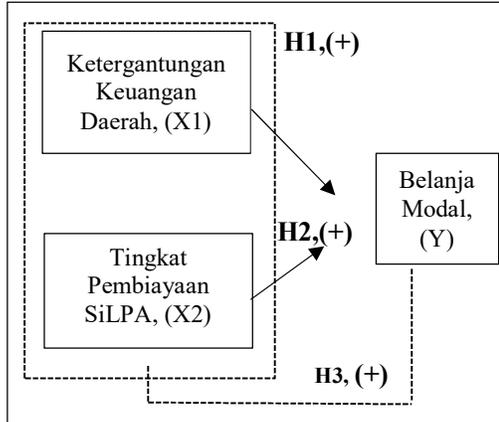
Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 “SiLPA merupakan perhitungan kelebihan penerimaan pada realisasi anggaran dan pengeluaran daerah, juga pendapatan dan pengeluaran pembiayaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah dalam satu jangka waktu laporan”. Sedangkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 merupakan “kelebihan penerimaan juga anggaran belanja dalam satu kurun waktu penganggaran”. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran periode lalu mencakup penerimaan pendapatan asli daerah, memperoleh dana perimbangan, menghemat pengeluaran, tidak terpenuhinya kewajiban pada pihak lain sampai dengan akhir periode,

memperoleh pendapatan daerah lain yang sah, memperoleh pembiayaan dan sisa biaya kegiatan lanjutannya.

Dengan mencermati penjelasan tersebut, maka kesimpulannya jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan kelebihan penerimaan realisasi yang menghasilkan penerimaan pembiayaan dan juga anggaran atau penggunaan rencana keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah pada kurun waktu akuntansi. Menurut (DJPK, 2014) menjelaskan SiLPA adalah perbandingan belanja ditangguhkan ataupun melihat besarnya proporsi SiLPA periode sebelumnya lalu dimanfaatkan dalam pengeluaran daerah untuk tahun sekarang. Proporsi pada pembiayaan SiLPA dapat ditentukan dengan metode berikut:

$$\text{Tingkat Pembiayaan SiLPA} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Setelah melihat penjelasan diatas maka kerangka penelitian dapat kita lihat gambar 1 berikut.



Gambar 1
Paradigma Penelitian

Dapat kita lihat pada gambar 1, sehingga hipotesis digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Ketergantungan keuangan daerah akan mempengaruhi belanja modal;
2. Tingkat pembiayaan pada SiLPA akan mempengaruhi belanja modal;
3. Ketergantungan keuangan pada daerah juga tingkat pembiayaan pada SiLPA

dengan bersamaan akan mempengaruhi belanja modal.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian terdapat dua variabel independen digunakan yaitu Ketergantungan keuangan pada daerah (X₁), tingkat pembiayaan SiLPA (X₂) selain itu ada variabel dependen yang digunakan ialah belanja modal (Y). Data penelitian menggunakan data pertahun untuk digunakan pada penelitian ini yaitu data runtun masa pada masa 2017-2021.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengaplikasikan laporan keuangan pemerintah terdiri dari 18 Kab/Kota Provinsi SUMSEL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 2017 s/d 2021 sebagai populasi, sehingga data akan diperoleh sebanyak 90. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu Laporan realisasi Anggaran dan Neraca yang berasal dari website resmi <http://www.bpk.go.id> yaitu laporan keuangan daerah pada 18 Kabupaten atau Kota di wilayah SUMSEL tahun 2017-2021. Sehingga, dalam penelitian ini memiliki total 90 observasi.

Data dan Sumber Data

Pada analisis data yang digunakan ialah data sekunder merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan yang telah di publikasi. Data tersebut meliputi data tahunan pada LKPD pada Kab/Kota Provinsi SUMSEL.

Teknik Analisis Data

Dengan adanya informasi juga data tersebut akan diolah dengan menggunakan program khusus yaitu SPSS versi 26, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan berbagai metode teknik model regresi berganda. Demikian pula, ada pengujian asumsi klasik yang menggabungkan pengujian normalitas, pengujian multikolinieritas, pengujian heterokedastisitas juga pengujian autokorelasi yang dilengkapi untuk memenuhi prasyarat dalam analisis regresi linier berganda. Selain itu, pengujian normalitas pada hasil akan diterapkan pengujian yaitu *Asymp. Sig one sample kolmogorov smirnov nilai*. dengan nilai 0,200 > dari level kesalahan 0,05 atau 5%.

Maka dari itu, jumlah yang tersisa dari linier regresi akan terdistribusi secara normal. Pada pengujian multikolinieritas akan memperlihatkan jumlah $tolerance > 0,10$ juga jumlah $Variance Inflation Factor < 10$ karena itu menyiratkan pada linier regresi dibebaskan akan adanya multikolinieritas. Adapun dampak pengujian heteroskedastisitas ada pada diagram scatterplot yang berupa titik menyebar dengan beracak-acak mulai dari permukaan atas hingga permukaan bawah pada angka 0 hingga sumbu Y sehingga dapat disimpulkan semuanya terlihat baik pada linier regresi tersebut. Selanjutnya yaitu angka Durbin Lower(DL) juga angka Durbin Upper(DU) dengan penelitian berjumlah sample(n) 90 juga faktor bebas berjumlah (k) 2 signifikansi 0,05 ialah sebesar 1,6119 dan 1,7026. Dilihat dari *output* pengujian autokorelasi, angka Durbin-Watson(DW) sebesar 1,792, sehingga model regresi dibebaskan dari adanya autokorelasi dengan alasan nilai $1,7026 < 1,792 < 2,2974$ atau $DU < DW < 4-DU$.

4. HASIL PADA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pemrosesan data menggunakan perangkat lunak yaitu SPSS versi 26 melihatkan *output* pengujian normalitas *Kolmogorov-smirnov*(K-S) ditunjukkan tabel 3 berikut.

Tabel 3
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03976143
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.064
	Negative	-.068
Test Statistic		.068
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwasannya *output* pengujian yaitu data dimiliki distribusi berbentuk normal. Sehingga jumlah yang ada pada signifikansi-*Asymp Sig. 2-tailed* bernilai 0,200, pada dasarnya jumlah itu

lebih dari 5% ($0,200 > 0,05$). Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan *output* pengujian bahwa data digunakan memiliki distribusi berbentuk normal.

Dari besaran regresi serta hubungan antara faktor x terhadap faktor y ditampilkan di tabel 4.

Tabel 4
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	
1	(Constant)	.123	.033		3.699	.000
	Ketergantungan Keuangan Daerah (X1)	.145	.042	.323	3.458	.001
	Tingkat Pembiayaan SiLPA (X2)	.317	.079	.376	4.030	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Informasi tersebut dapat ditemukan di Tabel 4 tersebut memperlihatkan akan hasil nilai konstanta juga nilai koefisien regresi, dibentuklah persamaan regresi linier berganda yang didapat dengan cara yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$= 0,123 + 0,323X_1 + 0,376X_2$$

Persamaan dalam metode regresi berganda diartikan bahwa:

1. Hasil dengan nilai 0,123 yang artinya jika faktor pada ketergantungan keuangan pada daerah juga tingkat pembiayaan SiLPA bernilai 0 (nol) hingga ditiadakan, belanja modal per kabupaten/kota akan bernilai 0,123 atau 12,3%.
2. Nilai pada Koefisien regresi faktor ketergantungan keuangan pada daerah (b1) memiliki hasil 0,145, mengartikan faktor ketergantungan keuangan berpengaruh positif pada belanja modal. Dikarenakan nilai tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan ketergantungan keuangan pada daerah yaitu bernilai 1%, diprediksikan belanja modal akan meningkat bernilai 14,5%. Namun sebaliknya, apabila ketergantungan keuangan menurun 1% dapat diprediksikan belanja modal menurun dengan nilai 14,5%.
3. Nilai pada Koefisien regresi variabel tingkat pembiayaan pada SiLPA (b2) mempunyai nilai yaitu 0,317, yang artinya

besaran pembiayaan pada SiLPA mempengaruhi belanja modal, artinya bahwa setiap peningkatan pada tingkat pembiayaan pada SiLPA dengan nilai 1%, dapat diprediksikan belanja modal akan terjadi peningkatan dengan nilai 31,7%. Namun sebaliknya, jika tingkat pembiayaan pada SiLPA menurun sebesar 1%, dapat diprediksi belanja modal mengalami penurunan sebesar 31,7%.

Hasil Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Dapat dilihat pada *output* pengujian secara parsial pada koefisien regresi berikut.

Tabel 5
Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.123	.033		3.699	.000
	Ketertgantungan Keuangan Daerah (X1)	.145	.042	.323	3.458	.001
	Tingkat Pembiayaan SiLPA (X2)	.317	.079	.376	4.030	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dapat dilihat pada tabel 5 tersebut indikator diterima atau ditolak dari hipotesis yang ada dilihat dari nilai T_{hitung} dengan nilai signifikansi dari setiap variabel ketertgantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA. Dapat disimpulkan dengan adanya hasil uji statistik t bahwa variabel pada ketertgantungan keuangan daerah memiliki nilai T_{hitung} 3.458, T_{hitung} lebih tinggi daripada T_{tabel} ($3,458 > 1,987$) dengan signifikansii yaitu 0,001 rendah dari 5% ($0,001 < 0,05$). Bisa disimpulkan apabila faktor pada ketertgantungan keuangan pada daerah akan berpengaruh pada belanja modal dengan signifikan secara parsial. Variabel pada tingkat pembiayaan SiLPA memiliki nilai T_{hitung} sebesar 4.030, artinya nilai T_{hitung} lebih tinggi dari T_{tabel} ($4,030 > 1,987$) dengan signifikansii yaitu 0,000 rendah dari 5% ($0,000 < 0,05$), Bisa diambil kesimpulan tingkat pada pembiayaan SiLPA akan memiliki pengaruh pada belanja modal dan signifikan secara parsial.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel dibawah menjelaskan hasil uji dengan software yaitu SPSS versi 26 didapat R square 0,0326.

Tabel 6
Hasil Uji Pada Koefisien Determinasi(R²)

Model	Model Summary ^b		
	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.310

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pembiayaan SiLPA (X2), Ketertgantungan Keuangan Daerah (X1)

b. Dependent Variable: Belanja Modal (Y)

Dapat dilihat bahwasannya R Square bernilai 0,326 atau 32,6%. Artinya, bahwa 32,6% variasi belanja modal dapat dijabarkan pada kedua faktor tersebut dan yang tersisa yaitu sebesar 67,4% ($100\% - 32,6\% = 67,4\%$) tidak diteliti dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Pembahasan Secara Parsial Ketertgantungan Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Juga Signifikan Terhadap Belanja Modal

Variabel pada ketertgantungan keuangan pada daerah mempengaruhi signifikan belanja modal. Dibuktikan dengan menguji hipotesis untuk lebih spesifik dimana nilainya yaitu T_{hitung} untuk faktor ketertgantungan keuangan pada daerah adalah 3,458. T_{hitung} yang diperoleh yaitu lebih tinggi dari T_{tabel} ($3,458 > 1,987$) signifikansi yaitu lebih kecil dari 5% ($0,001 < 0,05$). Besarnya dampak ketertgantungan keuangan pada daerah pada belanja modal masing-masing daerah adalah 0,145 atau 14,5% dan itu berarti apabila terjadi kenaikan ketertgantungan keuangan masing-masing daerah dengan nilai 1% belanja modal juga meningkat dengan nilai 14,5%. Dengan cara ini, cenderung terlihat H_0 ditolak dan H_1 diterima, demikian juga dapat disimpulkan bahwasannya secara parsial variabel ketertgantungan keuangan pada daerah akan mempengaruhi secara positif dan signifikan belanja modal yang artinya apabila setiap kenaikan ketertgantungan keuangan daerah bisa menyebabkan kenaikan nilai belanja modal.

Pada dasarnya tidak semua daerah dapat otonom dan juga tidak bergantung pada

pempus ataupun pemda, karena terlihat jika sumber pendapatan asli dari penerimaan antara wilayah ke wilayah berikutnya sangat beraneka ragam. Pertama-tama, terdapat wilayah yang memiliki potensi yang dapat menyelesaikan kemandirian daerahnya, tidak menutup kemungkinan terdapat wilayah yang dapat menanggung masalah. Sehingga, otonomi pada wilayah tersebut rendah juga setelah semuanya pemda jadi otonom juga tunduk akan otoritas publik. Karena itu, hasil pengujian dikaitkan akan faktor ketergantungan keuangan yang juga pasti akan mempengaruhi belanja modal pada Kab/Kota di Provinsi SUMSEL.

Hasil dari analisis peneliti setara dengan penelitian menyatakan ketergantungan keuangan daerah mempengaruhi belanja modal (Hady, dkk, 2018). Namun penelitian ini berbanding terbalik pada penelitian (Yulistiani & Suji, 2020) menyatakan jika ketergantungan keuangan tidak mempengaruhi belanja modal, hal itu dikarenakan banyak menyesuaikan pendapatan dana perimbangan yaitu berasal dari dana alokasi umum yang berkontribusi yaitu hampir 60% dengan penggunaan lebih banyak difungsikan dalam menutup kebutuhan belanja operasional dan belanja pegawai.

Pembahasan Secara Parsial Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Belanja Modal

Setelah melalui beberapa pengujian, variabel pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempengaruhi positif belanja modal. Dibuktikan dengan adanya uji pada hipotesis dengan nilai T_{hitung} untuk variabel tingkat pembiayaan SiLPA adalah sebesar 4,030. Nilai pada T_{hitung} didapatkan lebih dari T_{tabel} yaitu ($4,030 > 1,987$) juga signifiikasi rendah dari 5% ($0,000 < 0,05$). Tingginya pengaruh yang ada di tingkat pembiayaan pada SiLPA dengan belanja modal masing-masing daerah sebesar 0,317 atau 31,7% yang artinya peningkatan tingkat pembiayaan SiLPA masing-masing kabupaten/kota sebesar 1% akan menaikkan nilai belanja modal sebesar 31,7%. Sehingga, bisa diketahui bahwasannya H_1 diterima dan H_0 ditolak juga bisa diambil kesimpulan jika secara parsial variabel tingkat pembiayaan pada SiLPA mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan yang artinya setiap peningkatan pada tingkat

pembiayaan pada SiLPA akan menyebabkan kenaikan nilai belanja modal.

Hal ini dikarenakan SiLPA pada tahun lalu adalah sumber penerimaan untuk tahun berikutnya dalam membiayai defisit pada anggaran tahun tersebut. Maka dari itu, besarnya nilai SiLPA tahun lalu dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran defisit APBN yang sedang berlangsung yang bagaimanapun juga didukung dari pendanaan bersih. Besarnya nilai SiLPA pada tahun sebelumnya yang telah dibentuk dikarenakan tak terealisasi pengeluaran yang akan dimanfaatkan lagi dalam mencapai realisasi pengeluaran satu diantaranya adalah pengeluaran modal yang sepenuhnya dimaksudkan untuk mendukung kegiatan juga proyek untuk menjadi kebutuhan daerah. Tingginya nilai tingkat pembiayaan pada SiLPA daerah akan berpengaruh pada belanja modal yaitu kenaikan juga pada tingkat pengeluaran belanja modal, dikarenakan SiLPA adalah salah satu dana yang akan digunakan atau bermanfaat pada pembangunan daerah.

Sama halnya dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa tingkat pembiayaan pada SiLPA mempengaruhi belanja modal secara positif dan signifikan (Yulistiani & Suji, 2020). Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian (Sartika, 2017) mengungkapkan tingkat pembiayaan pada SiLPA tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini dikarenakan seluruh ataupun sebagian dari SiLPA di daerah ditujukan untuk belanja akuisisi barang jasa jumlah keuntungannya di bawah 1 tahun yang juga digunakan akan penggunaan jasa untuk aktivitas juga proyek pada Pemerintah Provinsi.

Pembahasan Secara Simultan Ketergantungan Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan Signifikan Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa secara simultan Ketergantungan Keuangan dan Tingkat Pembiayaan pada SiLPA mempengaruhi positif Belanja Modal pada Kab/Kota di provinsi Sumatrera Selatan selama 2017-2021. Hal itu ditunjukkan dari hasil analisis variabel yang diketahui nilai uji F atau uji simultan yaitu nilai F_{hitung} sebesar 21,013 dan signifiikasi nilai

didapat 0,000. Selanjutnya, F_{hitung} yang didapat lebih dari F_{tabel} ($21,013 > 2,48$) signifikansi diperoleh rendah dari 5% yaitu ($0,000 < 0,05$), Maka dari itu, ditarik kesimpulan bahwasannya variabel ketergantungan keuangan pada daerah dan tingkat pembiayaan pada SiLPA bersamaan berpengaruh dengan belanja modal positif dan signifikan, artinya H_4 dapat diterima.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Ketergantungan Keuangan pada Daerah juga Tingkat Pembiayaan pada SiLPA secara bersama-sama mempengaruhi belanja modal di Provinsi SUMSEL. Hal tersebut memperlihatkan model regresi linier terbentuk dengan melibatkan 2 variabel tersebut sangat layak untuk memprediksi variasi nilai variabel belanja modal di Provinsi SUMSEL. Karena pengujian simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat bertujuan memberikan gambaran kelayakan hasil model regresi.

Hal ini sama halnya dengan penelitian yang menyatakan bahwasannya secara simultan ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan pada SiLPA mempengaruhi belanja modal dengan signifikan (Hady, dkk, 2018), (Yulistiani & Suji, 2020), (Amelia, Mila, 2022).

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil dalam pengujian hipotesis yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini, Didapatkan kesimpulan tentang pengaruh Ketergantungan Keuangan pada Daerah juga Tingkat Pembiayaan pada SiLPA pada Belanja Modal :

1. Pengujian dengan cara parsial memberikan hasil bahwasannya Ketergantungan Keuangan Daerah (X1) dan Tingkat Pembiayaan pada SiLPA (X2) terbukti mempengaruhi Belanja Modal secara positif signifikan pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pengujian dengan cara simultan memberikan hasil Ketergantungan Keuangan Daerah (X1), dan Tingkat Pembiayaan SiLPA (X2) terbukti mempengaruhi Belanja Modal positif signifikan pada Kab/Kota di Provinsi SUMSEL.

3. Didapatkan pada hasil uji simultan antara variabel Ketergantungan Keuangan pada Daerah(X1), dan Tingkat Pembiayaan SiLPA(X2) terhadap belanja modal(Y) diatas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar nilai 0,326 atau sebesar 32,6%. Hal tersebut artinya bahwasannya nilai 32,6% variasi pada belanja modal dijelaskan dari kedua variabel bebas tersebut yaitu ketergantungan keuangan daerah juga tingkat pembiayaan pada SiLPA. Sedangkan sisanya $67,4\%$ ($100\% - 32,6\% = 67,4\%$) terdapat variabel yang mempengaruhi tetapi tidak ada pada penelitian ini.

Saran

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap belanja modal. Faktor-faktor lainnya yang berasal dari sumber penerimaan lainnya tidak disertakan dalam penelitian ini.
2. Populasi penelitian ini hanya meliputi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2017-2021.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen yang memungkinkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal dan penelitian ini hanya menggunakan daerah yang terdapat di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan daerah yang ada di Kabupaten/Kota lain maupun di provinsi lain, sehingga dapat dilihat sudah seberapa besar keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan belanja daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2019). Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP). <http://www.bpk.go.id/lkpp>. (di akses 27 April 2023).
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2017-2021). Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

- Republik Indonesia Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017-2021.
- Beritasatu.com. (2021). Arnoldus Kristianus. Diakses pada tanggal 14 Mei 2023, dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/769737/kemdagri-mintapemda-tingkatkan-alokasi-belanja-modal>.
- Daerah, P. K., Pemerintah, S. A., & LKPD, A. A. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.(2011). Jakarta.
- Devi, A. S., Masnila, N. M., & Nurhasanah, N. N. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(6), 971-988.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2014*. Jakarta. DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Indonesia, P. R. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Keempat). UPP STIM YKPN.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35.
- Nasional kontan. (2021). Siti Masitoh. Diakses pada tanggal 25 Mei 2023, dari: <https://nasional.kontan.co.id/news/belanja-apbd-turun-di-beberapa-pos-salah-satunya-belanja-perlindungan-sosial>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi.
- Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Prawoto, B., & Basuki, A. T. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. *Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada*.

Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2019). Analisis Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah di Indonesia. *ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONE*, 3(2), 104-117.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang, R. I. (2005). Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta*.

Undang-Undang, R. I. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. *Jakarta: Presiden Republik Indonesia*.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 61-74.